

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM SEMBAKO
DI KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

OLEH:

SITI ULFA ALFARISHI

178520017



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/12/21

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM SEMBAKO
DI KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik**

OLEH:

SITI ULFA ALFARISHI

178520017

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

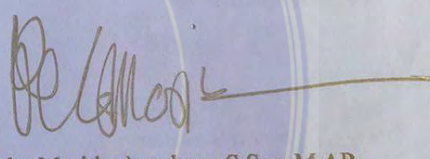
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Program Sembako di Kabupaten
Deli Serdang

Nama Mahasiwa : Siti Ulfa Alfarishi

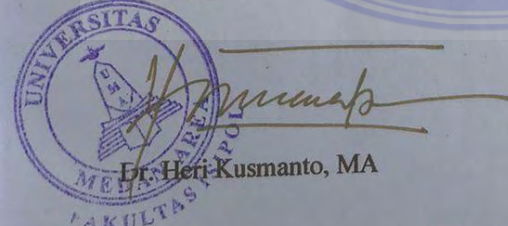
NPM : 178520017

Program Studi : Administrasi Publik

Disetujui Oleh

Pembimbing I	Pembimbing II
	
Drs. Bapak Bahrum Jamil, M.AP	Beby Masitho Batubara, S.Sos. M.AP

Mengtahui :

Dekan	Ka. Prodi Administrasi Publik
	
Dr. Heri Kusmanto, MA	Nina Angelina, S.Sos, M.Si

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari berbagai sumber, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika dalam penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Agustus 2021



Siti Ulfa Alfarishi

178520017

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Ulfa Alfarishi
NPM : 178520017
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Implementasi Kebijakan Program Sembako di Kabupaten Deli Serdang. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihkkan media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, Agustus 2021



Siti Ulfa Alfarishi
17.852.0017

iii

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM SEMBAKO DI KABUPATEN DELI SERDANG

Abstrak

Satu diantara masalah di Indonesia adalah kemiskinan. Dimana kemiskinan ini adalah kurangnya kesejahteraan. Masalah kemiskinan dianggap sebagai sebagai salah satu hal penghambat proses pembangunan sebuah Negara. Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat miskin adalah Program Sembako. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Sembako dan hambatan dalam mengimplementasikan Program Sembako di Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan secara objektif, mendalam dari hasil yang diperoleh di lokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan data observasi, wawancara kepada sejumlah informan, dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan data kesimpulan dari hasil penelitian. Dan dari hasil penelitian yang dilakukan, bahwa Implementasi Program Sembako di Kabupaten Deli Serdang dikatakan belum berjalan efektif, dikarenakan beberapa faktor yang menghambat implementasi Program Sembako antara lain: keberadaan penerima Kartu Keluarga Sejahtera yang tidak jelas, dan tidak tepat sasaran bagi penerima bantuan. Keterbatasan waktu pemberian Sembako kepada Keluarga Penerima Manfaat yang biasanya diberikan sebulan sekali, tetapi dalam satu bulan Keluarga Penerima Manfaat belum mendapatkan Sembako.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Program Sembako.

Abstrack

One of the problems in Indonesia is poverty. Where poverty is a lack of welfare, The problem of poverty is considered as one of the obstacles to the development process of a country. One of the programs established by the government to reduce the burden on the community in meeting the needs of the poor is the Basic Food Program. This study aims to analyze the implementation of the Basic Food Program policy and the obstacles in implementing the Basic Food Program in Deli Serdang Regency by using qualitative methods to explain objectively, in depth from the results obtained at the research location. Data was collected by means of observation data, interviews with a number of informants, and documentation. The data analysis technique was carried out in several stages, namely data reduction, data presentation, and data drawing conclusions from the research results. And from the results of research conducted, that the implementation of the Basic Food Program in Deli Serdang Regency is said to have not been effective, due to several factors that hinder the implementation of the Basic Food Program, including: the existence of the recipients of the Prosperous Family Card which is not clear, and is not right on target for the recipients of assistance. The limited time for providing basic food items to beneficiary families, which are usually given once a month, but within one month the beneficiary families have not received basic food.

Keywords: Implementation, Policy, Basic Food Program.

RIWAYAT HIDUP

Siti Ulfa Alfarishi adalah nama penulis skripsi ini. Lahir pada tanggal 21 Desember 1999, di Medan, Sumatera Utara. Penulis merupakan anak ke 2 dari 4 bersaudara, dari pasangan Salman dan Sri Wahyuni. Penulis pertama kali masuk pendidikan di SD Swasta Kartini pada tahun 2005 dan tamat 2011 pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke MTS Al-Ulum Medan dan tamat pada tahun 2014. Setelah tamat di MTs, penulis melanjutkan ke SMA Swasta Kesatria Medan dan tamat pada tahun 2017. Dan pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai Mahasiswi di Universitas Medan Area Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Publik dan tamat pada tahun 2021.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk belajar dan berusaha, Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Program Sembako di Kabupaten Deli Serdang”**.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur, saya panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa mmberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi salah satu syarat kelulusan di Program Administrasi Publik Universitas Medan Area dan mem peroleh gelar Sarjana pendidikan pada Program Studi Administrasi Publik Universitas Medan Area.

Dalam penyusun skripsi ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dapat tersusun dengan baik karena bimbingan, arahan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih, cinta dan syukur kepada semua pihak. Yang membantu menyelesaikan Studi di Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unversitas Medan Area, yaitu :

1. Kepada ayah dan ibu yang telah membantu penulis dengan doa, dukungan yang sepenuh hati mereka kedapa anaknya.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, yaitu Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA
3. Pembimbing pertama saya yang telah memberikan arahan, motivasi, dam bantuan kepada saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini, yitu Drs. Bapak Bahrum Jamil, M.AP

4. Pembimbing II saya yang telah membantu saya untuk memotivasi, mendukung, dan membimbing saya dalam menulis hingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini, yaitu Ibu Beby Mashito Batubara, S.Sos, M.AP
5. Sekretaris penulis yang telah meluangkan waktu dan memberikan saran serta arahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu Ibu Riri Rezeki Hariani, S.Sos, M.AP
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Administrasi Publik dan Dosen Studi lain yang telah memberikan bimbingan, semangat dan ilmu kepada penulis selama perkuliahan.
7. Seluruh Staff Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
8. Kepada Handre, sasa, adha, awik, ira, saras, dinda, citra, silvi, riris, reza, teman-teman stambuk 17, abang-abang dan kakak-kakak saya, yang sudah membantu dan mendukung saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis, oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat dibutuhkan oleh penulis.

Akhir kata penulis berharap skripsi ini memenuhi kriteria kelulusan, bermanfaat dan menambah ilmu bagi pembaca.

Medan, 2021

Penulis

Siti Ulfa Alfarishi

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	ivv
ABSTRACK.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II.....	5
TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. Pengertian Administrasi Publik.....	5
2.2 Pengertian implementasi	7
2.3 Pengertian Kebijakan	11
2.3.1 Proses Penyusunan Kebijakan Publik	12
2.4 Konsep Prgram Sembako	14
2.4.1 Pengertian dan Sejarah Program Sembako	14
2.4.2 Pengertian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	15
2.4.4 Penerima Program Sembako Dengan Menggunakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).....	18
2.4.5 Mekanisme Pelaksanaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)	21
2.5 Pengertian Kemiskinan.....	26
2.5.1 Bentuk – bentuk Kemiskinan	26
2.5.2 Penanggulangan Kemiskinan	28
2.6 Peneliti Terdahulu	29
2.7 Kerangka Pemikiran	31
BAB III.....	34

METODE PENELITIAN	34
3.1. Jenis Penelitian	34
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
3.3. Informan Penelitian	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.4.1 Observasi.....	37
3.4.2 Wawancara	37
3.4.3 Dokumentasi.....	38
3.4.4 Triangulasi Data.....	39
3.5 Metode Analisis Data	39
3.5.1 Reduksi data	39
3.5.2 Penyajian Data	40
3.5.3 Penarikan Kesimpulan	40
BAB	
IV.....	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Deskripsi Umum Lokasi Penelitian	41
4.1.1 Visi, Misi, dan Tujuan Dinas Sosial	41
4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial.....	42
4.1.3 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang .	44
4.2 Pembahasan	53
4.2.1 Implementasi Kebijakan Program Sembako di Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang	53
1. Faktor Komunikasi	58
2. Faktor Sumber Daya	61
3. Faktor Disposisi.....	64
4. Faktor Struktur Birokrasi.....	67
4.2.2 Faktor-faktor penghambat implementasi Program Sembako di Kabupaten Deli Serdang	68
BAB V.....	70
KESIMPULAN DAN SARAN	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72

LAMPIRAN.....	73
Lampiran Wawancara.....	73
Lampiran Dokumentasi Tempat Penelitian	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Mekanisme Penyaluran Dana dan Bentuk Bantuan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).....	16
Gambar 1. Kantor Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang.....	73
Gambar 2. Kantor Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang.....	73
Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Drs. Teddy Bachtaris sebagai Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin.....	74
Gambar 4. Wawancara dengan Ibu Hj. Nani Aprinawati, SH sebagai Kepala Seksi Bidang Penanganan Fakir Miskin	74
Gambar 5. Wawancara dengan penerima Program Sembako dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Ibu Asih Juniarti (37) di jalan sidumulyo gg.semangka, Batang kuis.....	75
Gambar 6. Wawancara dengan penerima Program Sembako dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Ibu Samini (48) di jalan Balai sesa, Tembung.....	75
Gambar 7. Wawancara dengan penerima program Sembako dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). ibu Juliani (40) yang berada di Dusun V Kecamatan Baru.....	76
Gambar 8. Wawancara dengan penerima program Sembako dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ibu Suwarsih (40) yang berada di Gang DPR dusun II kecamatan bakaran batu.....	76
Gambar 7. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).....	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi masalah utama di seluruh Provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Sumatera Utara. Dimana kemiskinan ini adalah kurangnya kesejahteraan, sehingga masyarakat miskin dapat diartikan sebagai keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Masalah kemiskinan dianggap sebagai salah satu hal penghambat proses pembangunan sebuah negara. Salah satu negara yang masih dibelit oleh masalah sosial ini adalah Indonesia.

Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat miskin adalah Program Sembako dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Bantuan Program Sembako dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ini diperuntukkan untuk keluarga kurang mampu. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial mengeluarkan Program Sembako dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu Kabupaten yang menyelenggarakan Program Sembako dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kabupaten Deli Serdang Berada di Provinsi Sumatera Utara yang beribukota di Lubuk Pakam. Kabupaten Deli Serdang Memiliki 22

Kecamatan, 14 Kelurahan dan 380 desa dengan luas wilayah mencapai 2.241.68 km² dan jumlah penduduk sekitar 1.791.677 jiwa (2017) dengan kepadatan penduduk 800 jiwa/km². Program Sembako menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera di Kabupaten Deli Serdang mulai dilaksanakan sejak tahun 2018. Dilihat dari luas dan banyaknya masyarakat yang berdomisili di Deli Serdang dan banyak juga masalah yang sering di hadapi oleh pelaksana dan KPM itu sendiri dalam melaksanakan Program Sembako dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera.

Pemberian Program Sembako dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) selama ini menimbulkan kecemburuan di masyarakat karena pembagian kartu yang belum tepat sasaran dan belum merata. Sesuai dengan kasus, ada masyarakat yang menerima kartu dan ada masyarakat yang tidak menerima kartu padahal kondisi sosial ekonominya sama persis.

Target dari Program Sembako dengan menggunakan Kartu keluarga Sejahtera ini adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari keluarga miskin masyarakat yang berpenghasilan rendah bantuan ini tujuannya untuk mengurangi masalah keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Melihat dari latar belakang peneliti ingin melihat bagaimana implementasi yang terjadi dalam penyelenggaraan Program Sembako menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dilakukan oleh dinas sosial, dalam mengukur sejauh mana implementasi program ini dan apa saja faktor yang menghambat pelaksanaan implementasi Program Sembako dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Pentingnya implementasi Program Sembako dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dijalankan oleh dinas sosial dalam pelaksanaan Program Sembako dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dari besarnya nominal yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat dalam satu program bantuan sosial masyarakat masih banyak menggunakan uang bantuan yang di serahkan tidak dipergunakan sebagai mana mestinya, dan masih ada penerima Program Sembako dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang kondisi ekonominya tergolong baik padahal masih banyak warga yang lebih layak menerima Program Sembako dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM SEMBAKO DI KABUPATEN DELI SERDANG"**

1.2 Rumusan Masalah

Untuk memperjelas agar permasalahan yang ada nantinya dapat dibahas lebih terarah dan sesuai dengan

1. Bagaimana Dinas Sosial dalam mengimplementasikan Program Sembako di Kabupaten Deli Serdang ?
2. Apa Faktor – faktor Penghambat implementasi Program Sembako di Kabupaten Deli Serdang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini

1. Untuk mengetahui bagaimana dinas sosial dalam mengimplementasikan Program Sembako di Kabupaten Deli Serdang
2. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang menghambat implementasi Program Sembako di Kabupaten Deli Serdang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa :

1. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu, khususnya Ilmu Administrasi Publik. Dan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan sumbangan ilmu pemikiran bagi kajian Implementasi Program Sembako Di Kabupaten Deli Serdang.
2. Penelitian ini bisa sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi penelitian sejenis pada masa yang akan datang. Khususnya dalam mengembangkan Implementasi Program Sembako Di Kabupaten Deli Serdang.
3. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan Informasi terkait dengan Program Sembako.
4. Bagi Pemerintah, penelitian ini kiranya dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam melakukan implementasi kebijakan publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Administrasi Publik

Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa latin *ad* dan *ministrare*, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta *administratio* yang berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan, dan pemerintahan, pengelolaan”.

Menurut Sondang P. Siagian (2008) dalam buku Wirman Syafri (2012) “administrasi diidentifikasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”

Menurut Leonard D. White (1958) dalam buku Wirman Syafri (2012) “*administration is a process common to all group effort, public or private, civil or military, large scale or small scale.*”

“administrasi ialah proses yang selalu terdapat pada setiap usaha kelompok, publik atau privat, sipil atau militer, skala besar atau kecil.”

Pendapat ini juga menunjuk dua hal, yakni sebagai berikut.

1. Administrasi adalah proses (rangkaian kegiatan).
2. Proses itu terdapat pada setiap usaha kelompok.

Istilah publik diartikan sebagai “umum, banyak orang, masyarakat, dan negara.” Akan tetapi, secara sosiologi, istilah publik tidak dapat disamakan dengan masyarakat. Secara sosiologi, masyarakat diartikan sebagai sistem

antarhubungan sosial di antara manusia yang hidup dan tinggal secara bersama yang terikat dengan norma atau nilai-nilai yang disepakati bersama.

Terminologi public administration ini berasal dari Amerika Serikat dan Inggris yang pada awalnya diahlibahasakan menjadi ilmu administrasi publik. Jauh sebelumnya orang mempergunakan istilah ilmu pemerintahan untuk menyebut subjek ini, namun perlu diketahui bahwa ilmu pemerintahan tidak betul-betul sama dengan ilmu administrasi publik.

Pada ilmu administasi publik juga ditemukan beragam definisi namun substansinya tetap sama, yaitu berbicara tentang kerja sama kelompok dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut pendapat Sondang P. Siagian administrasi publik adalah “keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara”

Dalam buku Wirman Syafri pendapat Edward H. Litchfield “administrasi publik adalah studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan-badan pemerintahan diorganisasi, dilengkapi tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin (dalam bintoro, 1995)”

2.2 Pengertian implementasi

Implementasi merupakan tahapan yang paling penting dalam sebuah kebijakan, tanpa implementasi suatu kebijakan tak dapat berjalan. Kebijakan merupakan seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan dan bukan merupakan keputusan tunggal, tetapi terdiri dari beberapa pilihan untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan rakyat banyak.

Implementasi dalam studi kebijakan publik bukan hanya sekedar bersangkutan dengan mekanisme penjelasan kebijakan-kebijakan politik di dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran birokrasi, melainkan implementasi ini juga menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan, dan karena itu dapat diartikan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari proses kebijakan.

Menurut (Nugroho Rian D, 2006 49) Implementasi prinsipnya adalah cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan, ada dua langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam suatu program, atau melalui rumusan kebijakan atau turunan dari kebijakan tersebut sebagai kebijakan penjabaran diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.

Menurut Dedy Mulyadi (2016:12) “Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan”

Sedangkan James P Laster dan Stewart dalam buku Indra Muda (2019:76) mengemukakan “implementasi dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai faktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang di inginkan”

Berdasarkan berbagai pendapat diatas dapat diketahui bahwa implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program – program yang akan ditetapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut. Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik yang digunakan dalam menganalisis Implementasi Program Sembako dengan menggunakan Kebijakan tentang Implementasi Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (*Communications*), Sumber Daya (*resources*), Sikap (*dispositions atau attitudes*) dan Struktur Birokrasi (*bureuratic strukture*).

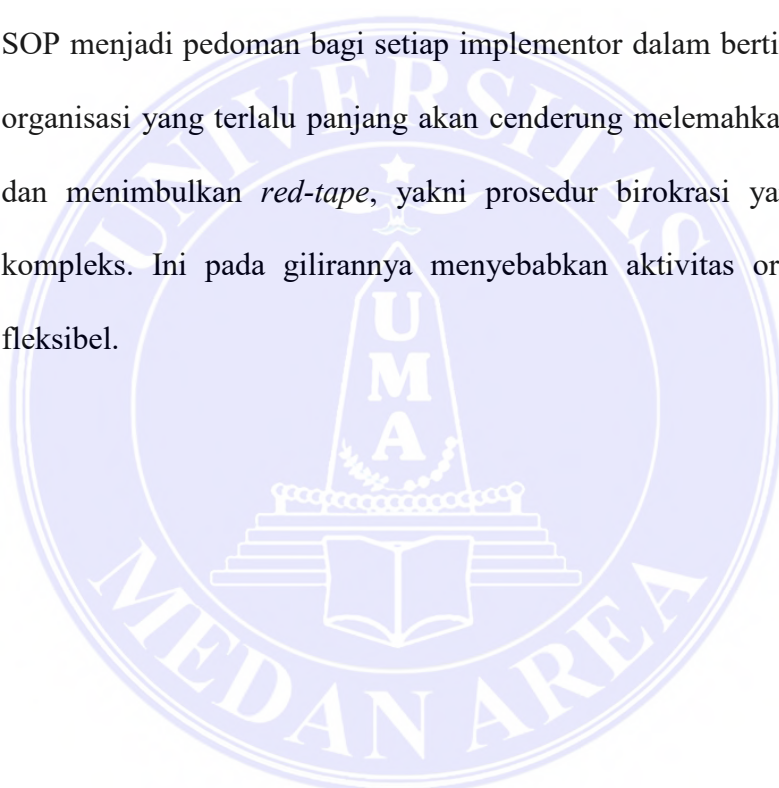
Keempat variabel diatas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan cara diturunkan (*membreakdown*) melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor – faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi

Model Implementasi kebijakan publik menurut George C. Edward III di dalam buku Deddy Mulyadi (2016: 68-69) menuju empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi yaitu :

1. Komunikasi keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
2. Sumber daya dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi, implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja.
3. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor

memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjadikan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalahh adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.



2.3 Pengertian Kebijakan

Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.

James E Anderson sebagaimana dalam buku Riant Nugroho D. (2006: 23) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Menurut Riant Nugroho D. (2006: 23-24) Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh administratur negara, atau administratur publik. Jadi, kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah.

Dalam buku Riant Nugroho D. (2006:31) bentuk kebijakan publik yaitu :

1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar, yaitu kelima peraturan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Presiden Daerah.
2. Kebijakan publik bersifat meso atau menengah, atau penjelas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, surat edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Wali Kota. Kebijakannya dapat pula berbentuk surat keputusan bersama atau SKB antar-menteri, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota.

3. Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

2.3.1 Proses Penyusunan Kebijakan Publik

Berdasarkan berbagai definisi para ahli kebijakan publik, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.

Menurut Rakhmat dalam buku Indra Muda (2019:5) “masalah kebijakan (*policy problem*) adalah masalah publik yang menyangkut kepentingan orang banyak. Masalah kebijakan dapat berupa masalah yang tidak strategis dan masalah strategis, masalah yang strategis mencakup empat syarat, luasnya cakupan, jangka waktu yang panjang, mempunyai ketertarikan yang luas dengan pihak lain, dan mengandung resiko. Identifikasi masalah kebijakan juga dapat dilihat dari tipe masalahnya seperti, sederhana, sedikit sederhana, dan rumit”.

Proses awal dari suatu kebijakan muncul karena terjadi silang pendapat di antara berbagai aktor kebijakan tentang luas dan dampak permasalahan yang timbul. Langkah awal ini menjadi bahan utama yang siap untuk direspon oleh aktor kebijakan dalam rangka menemukan jalan keluar untuk memecahkan masalah.

Menurut Dunn dalam buku Indra Muda (2019:6) “proses pembuatan kebijakan publik selalu diawali oleh serangkaian kegiatan yang saling bertautan dan berhubungan antara satu sama lain. Proses tersebut terdiri dari kegiatan

penyusunan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi dan evaluasi atau penilaian sebuah kebijakan publik”

Proses penyusunan agenda kebijakan (*agenda setting*) yaitu suatu proses yang meliputi tindakan dan strategi (*action and strategies*) di mana isu-isu tertentu kepada tingkatan kebijakan yang lebih tinggi. Dalam hal ini masalah kebijakan memainkan peranan yang sangat penting dalam menetapkan masalah tertentu terhadap agenda kebijakan publik.

Penilaian/Evaluasi Kebijakan Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Tujuan kebijakan publik dalam buku Riant Nugroho D. (2006:36-37) kebijakan publik adalah keputusan. Otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama. Tujuan dari kebijakan publik dapat dibedakan dari sisi sumber daya atau resources, yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan mendistribusi sumber daya negara dan yang bertujuan menyerap sumber daya negara.

2.4 Konsep Prgram Sembako

2.4.1 Pengertian dan Sejarah Program Sembako

Program Sembako adalah pengembangan dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai program perubahan bantuan pangan untuk memastikan program ini lebih tepat sasaran, jumlah, waktu, tepat kualitas, tepat administrasi. Sama seperti Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Sembako juga diharapkan dapat memberikan pilihan kepada penerima manfaat untuk memilih jenis, kualitas harga dan tempat membeli bahan pangan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara nontunai dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nrgara Tahun Anggaran 2020 yang menjadi Dasar Hukum Program Sembako yang menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera sebagai alat untuk mendapatkan bantuan tersrbut.

Pemerintah meningkatkan nilai bantuan dan memperluas jenis kebutuhan apa saja yang dapat dibeli agar tidak hanya berupa beras dan telur seperti pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), namun juga kebutuhan pokok lain ysng mengandung sumber protein hewani, protein nabati, karbohidrat, maupun vitamin dan sebagai upaya pemerintah untuk memberikan akses Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam kandungan gizi.

Program Sembako ini dilaksanakan di seluruh wilayah indoesia, yang termasuk wilayah ang memiliki keterbatasan dari sisi infrastruktur nontunai. Sinyal uang kurang baik, dan akses geografis, dengan memberlakukan sarana khusus untuk wilayah dengan kendala akses tersebut.

Bantuan Program Sembako diberikan melalui sistem perbankan, yang diharapkan juga dapat mendorong perilaku produktif untuk masyarakat dan mengembangkan ekonomi lokal.

Pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektifitas program bantuan sosial pangan, maka itu Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di perbarui menjadi Program Sembako memperluas jenis kebutuhan pokok lain tidak hanya beras dan telur saja. Jumlah bantuan yang semula Rp.110.000/KPM/bulan naik menjadi Rp.200.000/KPM/bulan. Adanya Program Sembako diharapkan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam hal makanan, sehingga dapat memastikan sebagian kebutuhan dasar keluarga miskin terpenuhi. Selain itu pengembangan jenis bahan pangan yang didapatkan dari Program Sembako ini akan mampu meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak sejak dini agar memiliki pengaruh terhadap penurunan masalah kekurangan gizi.

Alat pembayaran elektronik untuk Program Sembako ini adalah Kartu Keluarga Sejahtera yang disebut KKS. Bank penyaluran Program Sembako adalah bank umum yang dimiliki negara sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi bantuan sosial yang disalurkan kepada penerima bantuan.

2.4.2 Pengertian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Program Sembako dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yaitu merupakan bantuan non tunai melalui pembukaan rekening bagi masyarakat kurang mampu yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Media yang digunakan sebagai

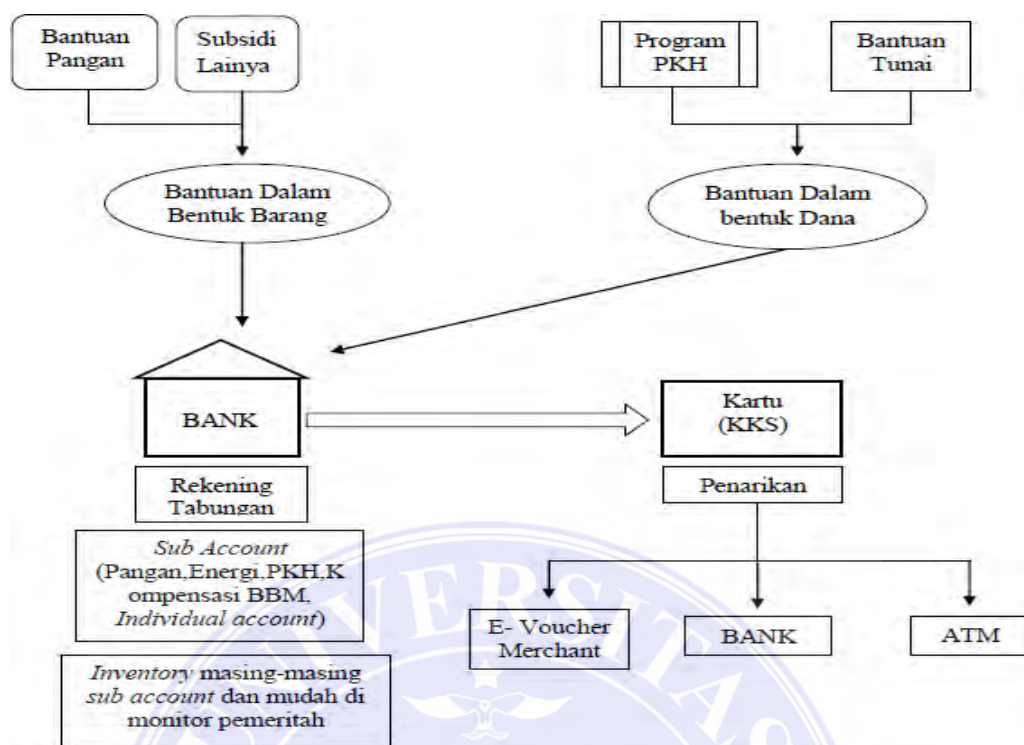
alat penyaluran dan bantuan Program Sembako kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Diberlakukannya metode pencarian bansos non tunai ini menggunakan buku tabungan dan kartu KKS adalah upaya mengajak masyarakat untuk berkenalan dengan perbankan, sistem penyaluran non-tunai akan disalurkan ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kartu KKS ini memiliki fitur saving account dan e-wallet yakni satu kartu dapat digeunakan berbagai program bansos, seperti Program Keluarga Sejahtera (KKS).

Secara nasional penerima KKS telah mencapai 15,5 juta keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia, yang terdiri dari satu (1) juta keluarga diberikan dalam bentuk layanan keuangan digital dengan pemberian *simcard*, dan sisahnya sebanyak 14,5 juta keluarga diberikan dalam bentuk giro pos secara bertahap di tahun 2015. Setiap keluarga diberikan sebanyak 200 ribu per bulan per keluarga yang diisi setiap 1 bulan sekali. Untuk tahap awal, pembagian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), *simcard* berisi uang elektronik.

Untuk memperbaiki efektivitas penyaluran bantuan sosial, pemerintah memutuskan untuk memberikan dalam bentuk simpanan. Alasan pemberian dalam bentuk simpanan adalah:

1. Simpanan/tabungan merupakan bentuk kegiatan produktif
2. Simpanan/tabungan merupakan bagian dari strategi nasional keuangan inklusif
3. Perbaikan dari program BLSM 2013 yang sekedar membagikan uang tunai
4. Mengurangi antrian.



Sumber : Pedoman Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) 2017

Gambar 2.1 Mekanisme Penyaluran Dana dan Bentuk Bantuan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

2.4.3 Fungsi dan Tujuan Program Sembako dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera

1. Fungsi Program Sembako dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

KKS ini berfungsi sebagai penanda bahwa si pemegang kartu ini berhak menerima bantuan uang dari pemerintah. Si pemilik KKS akan diberikan SIM Card yang bisa dipasang di handphone untuk mengecek saldo. Fungsi SIM Card ini mirip dengan rekening bank. Untuk mengambil uang bantuan dari pemerintah tersebut, bisa datang ke kantor pos terdekat dengan menunjukkan nomor SIM Card tersebut. Layanan ini biasa disebut e-money atau layanan keuangan digital, atau dengan cara bisa melihat penyalurannya melalui aplikasi *141*6# dari telepon genggam mereka.

2. Tujuan Program Sembako dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

1. Mengurangi beban pengeluaran Keluarga penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan.
2. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada Keluarga penerima Manfaat (KPM)
3. Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan tepat administrasi
4. Memberikan pilihan dan kendali kepada Keluarga penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan

2.4.4 Penerima Program Sembako Dengan Menggunakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

Perima manfaat Program Sembako dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi rendah di daerah pelaksanaan, yang namanya termasuk di dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) di tetapkan oleh KPA di kementrian sosial. Melalui aplikasi SIKS-NG menu BSP yaitu sistem pengelolaan data yang dikembangkan oleh pusdatin Kementerian Sosial.

Untuk setiap Keluarga penerima Manfaat (KPM) SKIKS-NG menu BSP memuat informasi sebagai berikut ;

1. Noor Induk Kependudukan (NIK) dari pengurus Keluarga penerima Manfaat (KPM)
2. Nomor ID pengurus Keluarga penerima Manfaat (KPM) dalam data terpadu kesejahteraan sosial.
3. Nomor ID BDT Keluarga penerima Manfaat (KPM) dalam data terpadu kesejahteraan sosial.
4. Nomor rekening Bansos, jika ada
5. Nomor KKS, jika ada
6. Nama pengurus Keluarga penerima Manfaat (KPM) (calon pemilik rekening)
7. Nomor Kartu Keluarga (KK), jika ada
8. Tempat lahir dari pengurus Keluarga penerima Manfaat (KPM)
9. Tanggal lahir dari pengurus Keluarga penerima Manfaat (KPM)

10. Nama gadis ibu kandung dari pengurus Keluarga penerima Manfaat (KPM)
11. Nomor peserta PKH, jika ada
12. Status PKH, jika ada
13. Nama Kepala Keluarga
14. Nama anggota keluarga lain
15. Alamat tinggal keluarga
16. Kode wilayah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan)

Penerima Program Sembako adalah keluarga, namun untuk kebutuhan penyaluran manfaat Program Sembako perlu ditentukan satu nama dalam Keluarga penerima Manfaat (KPM) sebagai pengurus Keluarga penerima Manfaat (KPM) yang akan menjadi pemilik rekening bantuan pangan.

Pengurus Keluarga penerima Manfaat (KPM) ditentukan menurut urutan prioritas sebagai berikut:

1. Diutamakan atas nama perempuan di dalam keluarga sebagai kepala keluarga ataupun sebagai pasangan kepala keluarga.
2. Jika tidak ada perempuan di dalam keluarga, sebagai kepala keluarga ataupun sebagai pasangan kepala keluarga, maka pengurus Keluarga penerima Manfaat (KPM) adalah anggota keluarga perempuan yang berumur di atas 17 tahun dan juga memiliki dokumen identitas kependudukan.
3. Jika Keluarga penerima Manfaat (KPM) tidak memiliki anggota perempuan di atas 17 tahun dan memiliki anggota perempuan, maka

pengurus Keluarga penerima Manfaat (KPM) adalah laki-laki yang menjadi kepala keluarga.

4. Jika laki-laki kepala keluarga tidak ada di dalam keluarga. Maka dapat diajukan anggota keluarga laki-laki yang berumur di atas 17 tahun dan memiliki dokumen identitas ukependudukan sebagai pengurus Keluarga penerima Manfaat (KPM).
5. Jika Keluarga penerima Manfaat (KPM) tidak memiliki anggota keluarga lain yang berumur 17 tahun ke atas dan memiliki dokumen identitas kependudukan, maka Keluarga penerima Manfaat (KPM) dapat di wakikan oleh anggota keluarga yang lain di dalam satu Kartu Keluarga sebagai pengurus Keluarga penerima Manfaat (KPM).

2.4.5 Mekanisme Pelaksanaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

1. Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota, perangkat desa/aparat kelurahan, dan Pendamping Sosial Bansos Pangan mendampingi Bank Penyalur pada saat proses distribusi KKS kepada KPM. Edukasi dan sosialisasi kepada KPM dapat dilakukan bersamaan pada saat proses distribusi KKS.
2. Pihak yang harus hadir dari KPM pada saat distribusi KKS adalah yang ditentukan sebagai Pengurus KPM, yaitu nama yang tercantum sebagai pemilik rekening bantuan pangan. Apabila Pengurus KPM tidak hadir pada saat distribusi KKS, perangkat desa/aparatur kelurahan dan Pendamping Sosial Bansos Pangan secara aktif mengecek keberadaan KPM.

3. Perlakuan bagi Pengurus KPM yang tidak hadir pada saat distribusi KKS (baik karena sakit, lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas, meninggal dunia, Pekerja Migran Indonesia (PMI), mendapatkan vonis berkekuatan hukum tetap atau sedang dalam proses hukum, tidak ditemukan domisilinya, sudah bercerai, maupun menolak menerima bantuan) merujuk pada Lampiran mengenai Mekanisme Penggantian Pengurus KPM.
4. Dokumen pendukung yang perlu dibawa oleh KPM pada saat proses distribusi KKS adalah dokumen identitas seperti KTP, Suket, KK, dan/atau dokumen lain yang dapat menunjukkan identitas sebenarnya dari yang bersangkutan.
5. Pada saat proses distribusi KKS, petugas Bank Penyalur memeriksa kesesuaian data pada KKS dengan dokumen identitas yang dibawa KPM.
6. Jika data pada KKS sesuai dengan dokumen identitas yang dibawa KPM, maka KPM harus melengkapi dan menandatangani formulir pembukaan rekening yang disediakan oleh Bank Penyalur.
7. Bank Penyalur menyerahkan KKS, lembar PIN, dan lembar informasi program disertai penjelasan kepada KPM mengenai program Sembako serta cara penggunaan KKS dan PIN.
8. Jika data pada KKS dan dokumen identitas yang dibawa KPM tidak sesuai, misalnya terdapat perbedaan nama, alamat maupun nomor identitas KPM maka petugas Bank Penyalur berkoordinasi dengan

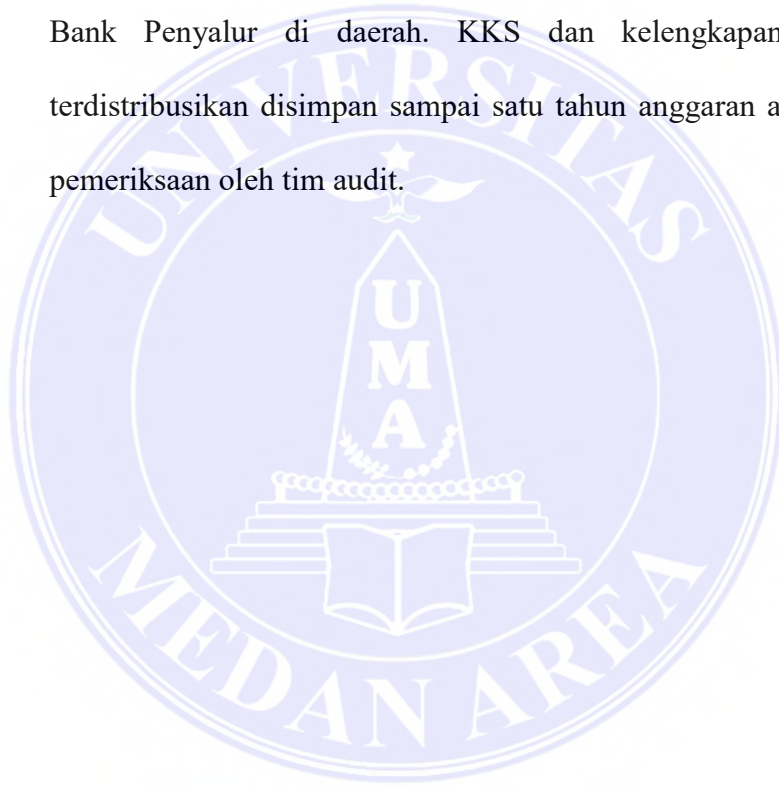
perangkat desa/aparatur kelurahan untuk mencocokkan data administrasi kependudukan di wilayahnya.

9. Apabila KPM terbukti adalah benar yang bersangkutan, maka pihak desa/kelurahan dapat memberikan surat keterangan terkait hal tersebut. Dengan adanya surat keterangan dari desa/kelurahan, petugas Bank Penyalur menyerahkan formulir pembukaan rekening bantuan pangan untuk dilengkapi dan ditandatangani oleh KPM untuk memperoleh KKS dan PIN. Contoh surat keterangan terdapat pada Lampiran.
10. KKS dan dokumen kelengkapannya tidak diserahkan kepada KPM apabila:
11. KPM tidak dapat menunjukkan dokumen identitas atau dokumen pendukung.
 - a) KPM tidak melengkapi dan menandatangani formulir
 - b) pembukaan rekening bantuan pangan
 - c) Terjadi perbedaan data KPM dengan data pada KKS yang tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya oleh pihak desa/kelurahan. d. KPM didapati telah memiliki KKS dari kepesertaannya pada program PKH.

Apabila saat registrasi/distribusi KKS didapati KPM telah memiliki KKS dari program PKH maka KKS yang baru tidak diserahkan kepada KPM dan dilaporkan kepada Bank Penyalur agar dapat dilakukan proses tunggalisasi KKS, dimana dana bantuan program Sembako akan disalurkan melalui KKS yang telah dimiliki dan digunakan Keluarga penerima Manfaat (KPM) untuk PKH.

1. Tenggat berakhirnya proses distribusi KKS kepada KPM ditentukan oleh Kementerian Sosial. Apabila distribusi KKS melewati tenggat yang ditentukan, maka Tim Koordinasi Bansos Pangan mengirim surat permohonan persetujuan yang dilengkapi dengan laporan hasil rekonsiliasi distribusi KKS kepada Kementerian Sosial. Proses distribusi KKS dapat dilanjutkan setelah Kementerian Sosial mengeluarkan persetujuan.
2. Setelah proses distribusi KKS berakhir, untuk rekonsiliasi data, Bank Penyalur di daerah menyampaikan laporan hasil distribusi KKS kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota dan Bank Penyalur di pusat mengenai:
3. Daftar dan jumlah KPM yang telah mendapatkan KKS dan kelengkapannya;
4. Daftar dan jumlah KPM yang gagal didistribusikan KKS dan kelengkapannya beserta alasannya.
5. Laporan rekonsiliasi data hasil distribusi KKS menggunakan format baku yang ditentukan oleh Kementerian Sosial dilengkapi dengan kode wilayah yang digunakan oleh satuan kerja pengelola data di bawah Kementerian Sosial, dan ditandatangani oleh Bank Penyalur di daerah dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
6. Laporan rekonsiliasi data hasil distribusi KKS tersebut dikirim oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota kepada Kementerian Sosial, dan mencakup:

7. Daftar dan jumlah KPM yang telah mendapatkan KKS dan kelengkapannya;
8. Daftar dan jumlah KPM yang gagal didistribusikan KKS dan kelengkapannya beserta alasannya.
9. Laporan yang sama dikirim Bank Penyalur di daerah kepada Bank Penyalur di pusat.
10. KKS yang tidak terdistribusikan dinonaktifkan dan disimpan oleh Bank Penyalur di daerah. KKS dan kelengkapan yang tidak terdistribusikan disimpan sampai satu tahun anggaran atau selesainya pemeriksaan oleh tim audit.



2.5 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan secara umum merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah – tengah masyarakat, kemiskinan merupakan konsep dan fenomena yang berwayuh wajah dan bermatra multidimensional.

Menurut Nugroho dan Dahuri 2012 :184, kemiskinan merupakan suatu kondisi absolut dan relatif di suatu wilayah dimana seseorang atau kelompok masyarakat tidak mencukupi kebutuhan dasar sesuai tata nilai yang berlaku. Jika dipandang dari aspek ekonomi, kemiskinan menunjukkan pada gap antara lemahnya *purchasing power* dan keinginan dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan suatu permasalahan dalam kehidupan masyarakat, keadaan dimana ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain sebagainya.

2.5.1 Bentuk – bentuk Kemiskinan

1. Kemiskinan Absolut adalah kemiskinan dimana orang – orang miskin memiliki pendapatannya dibawah garis kemiskinan atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Sehingga kemiskinan absolut ini bisa diartikan dengan melihat seberapa jauh perbedaan antara tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pengeluaran per bulannya di bawah garis kemiskinan di golongan sebagai penduduk miskin.

2. Kemiskinan Relatif adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara tingkat pendapatan dan tingkat pendapatan lainnya. Sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut sebenarnya telah diatas garis kemiskinan namun masih berada dibawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk. Dalam hal mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduuk miskin, maka garis kemiskinan relatif cukup untuk digunakan, dan perlu di sesuaikan terhadap tingkat pembangunan negara secara keseluruhan. Garis kemiskinan relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar negara dan waktu, karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama.
3. Kemiskinan natural adalah keadaan miskin karena dari awalnya keadaan yang miskin. Kelompok masyarakat ini menjadi miskin Karena tidak memiliki sumber daya yang memadai baik sumber daya alam, manusia, maupun pembangunan, atau kalau mereka ikut serta dalam pembangunan, mereka hanya mendapat imbalan pendapatan rendah. Menurut Baswir, kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor – faktor alamiah seperti karena cacat, sakit, usia lanjut, menurut Kartasasmita disebut sebagai “*persisten poverty*” yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun menurun.

4. Kemiskinan kultural mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok, masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya dimana mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Kelompok masyarakat seperti ini mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mau berusaha untuk memperbaiki, dan mengubah tingkat kehidupannya. Akibatnya tingkat pendapatan mereka rendah, menurut ukuran yang dipakai secara umum. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Baswir bahwa ia miskin karena faktor budaya, seperti malas, tidak disiplin dan boros.
5. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor – faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Selanjutnya Sumodiningrat mengatakan bahwa munculnya kemiskinan struktural disebabkan karena berupaya menanggulangi kemiskinan natural, yaitu dengan direncanakan bermacam – macam program dan kebijakan. Namun karena pelaksanaannya tidak seimbang, pemilikan sumber daya tidak merata, kesempatan yang tidak sama menyebabkan keikutsertaan masyarakat menjadi tidak merata pula, sehingga menimbulkan struktur masyarakat yang timpang.

2.5.2 Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat

memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk:

- a. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin.
- b. Memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak – hak dasar.
- c. Mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial, memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas – luasnya dalam pemenuhan dan hak – hak dasar dan peningkatan mutu hidup secara berkelanjutan
- d. Memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dan bimbingan sosial, pelayanan sosial, penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar, penyediaan akses pelayanan perumahan dan pemukiman, atau penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.

2.6 Peneliti Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu dilakukan oleh peneliti lain, dan memiliki

kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andela anggleni yang di terbitkan pada jurnal vol 1 nomor 1 edisi September 2018, dengan judul “Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di

Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bagaimana upaya pemerintah melaksanakan kebijakan program kartu keluarga sejahtera dilakukan untuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari kemiskinan belum berjalan efektif dalam pelaksanaan karena beberapa faktor seperti warga miskin belum ikut serta, kurangnya sosialisasi dan koordinasi dari pemerintah untuk kebijakan sehingga data penerima program kurang tepat, yang menimbulkan kecemburan sosial dalam pelaksanaan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ana Rosaliana, Susi Hardjati yang diterbitkan dalam jurnal administrasi publik vol 1 nomor 2 tahun 2019, dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan wonocolo, Kota Surabaya”. hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terlaksana secara tepat waktu, baik penyaluran bantuan dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan penyaluran dana bantuan operasional dari e-warong yang dikelola oleh pemerintah. Tapi dilihat dari ketetapan pilihan, pemerintah belum perlu memperbaiki dalam penentuan calon penerima BPNT dan kurangnya pembaharuan terhadap informasi data, dari pemelihan kebutuhan yang terbatas seperti beras kurang efektif, karena ada sebagian KPM yang menginginkan pilihan kebutuhan pangan tidak hanya beras, dan telur. dan terdapat indikasi ketetapan pengguna

Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) masih belum efektif, karena masih adanya KPM yang menumpuk dana bantuannya dan tidak mengambil sesuai jadwal yang diberikan. Terdapat juga KPM yang tidak tepat mendapatkan bantuan karena terindikasi sebagai keluarga yang mampu. Dan langkah strategik dalam upaya mencapai tujuan BPNT dapat di analisis bahwa langkah tersebut kurang efektif dan masih memerlukan perbaikan.

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah narasi atau uraian atau pernyataan (proporsi) tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan.

Menurut Polancik (2009:18) kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian, kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (*research*), dan mempresentasikan suatu himpunan dan beberapa konsep serta hubungan diantara konsep – konsep tersebut.

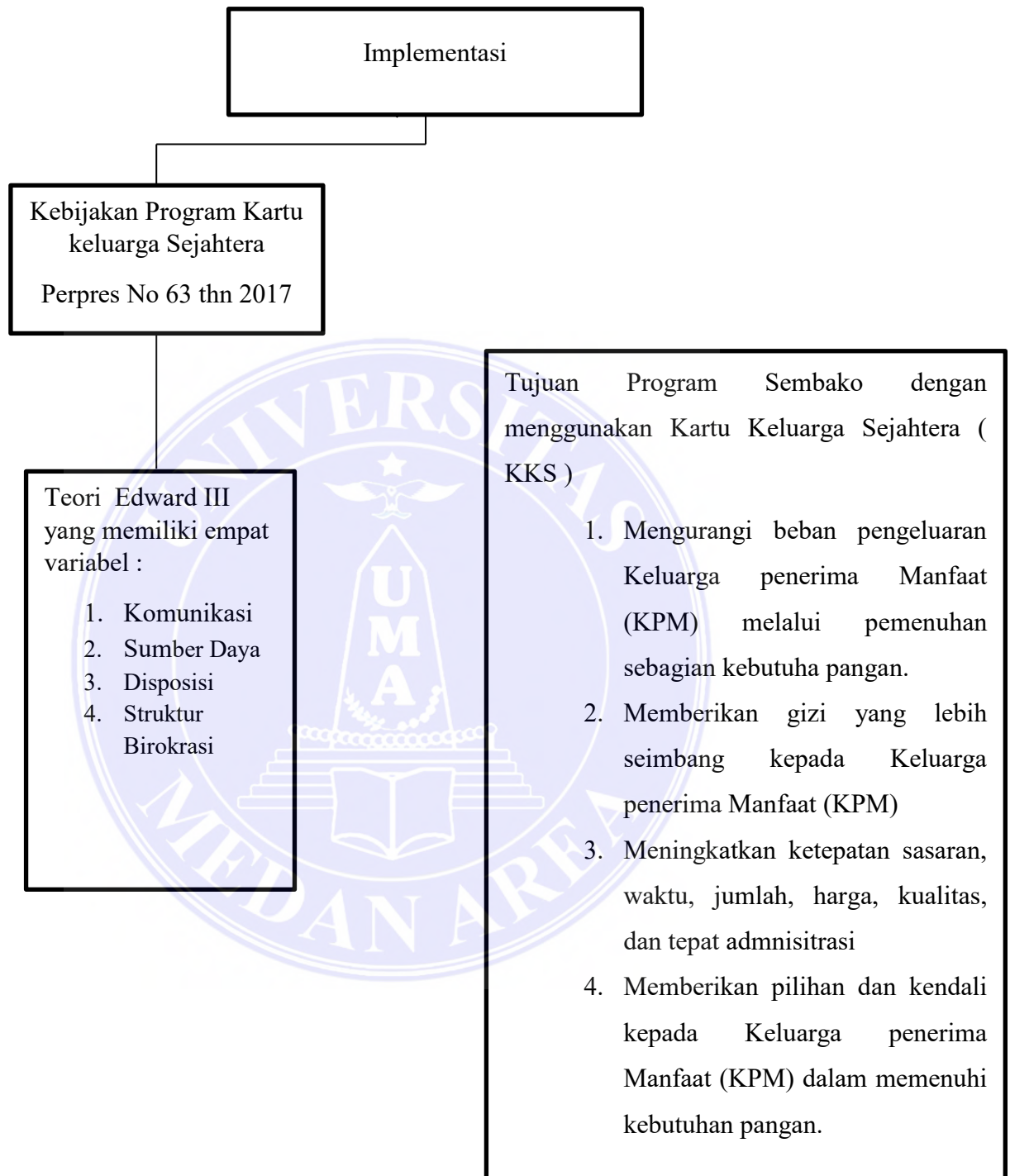
Tujuan dari setiap organisasi dalam pelayanan publik kepada masyarakat adalah untuk memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan untuk masyarakat. Dinas sosial adalah organisasi pemerintahan yang melayani publik dengan tugas pokok dan fungsinya. Dinas sosial sebagai pelaksana sangat dibutuhkan peranannya dalam memantau program dan mengevaluasi program yang telah dijalankan oleh dinas sosial di Kabupaten Deli Serdang.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menghentikan kemiskinan yaitu memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Peran

dinas sosial sangat diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat yang membutuhkan. Sangat diharapkan program ini berjalan dengan semestinya dalam peraturan yang ada. Dan program ini dapat diterima di masyarakat yang memang membutuhkan bantuan tersebut dan tidak salah sasaran.

Adapun kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian Implementasi Program Keluarga Sejahtera (KKS) Kabupaten Deli Serdang Serdang sebagai berikut :





Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang dimaksud adalah dengan menggunakan keterangan data yang didapat pada saat penelitian di lapangan berupa data-data yang secara tertulis maupun lisan dari pihak-pihak yang terlibat. Untuk mencari data – data yang diperoleh dan di himpun oleh informan kemudian dikumpulkan dan disajikan dalam bentuk kalimat – kalimat. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dimana peneliti terjun ke lapangan dengan melakukan observasi secara langsung dan melakukan wawancara terhadap narasumber.

Dalam buku Imam Gunawan (2016:82) menurut Bodgan & Taylor Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara utuh.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Dinas Sosial Jl. Medan – tebing tinggi, Tj. Garbus satu, kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20551.

No.	Uraian Kegiatan	Desember 2020	Januari 2021	Februari 2021	Maret 2021	April 2021	Mei 2021	Juni 2021	Juli 2021	Agustus 2021
1	Seminar Proposal									
2	Data/ Penelitian									
3	Seminar Hasil									
4	Penyusunan Skripsi									
5	Bimbingan Skripsi									
6	Perbaikan Skripsi									
7	Sidang Meja Hijau									

Tabel 3.1 waktu penelitian

3.3. Informan Penelitian

Informan penelitian dipilih secara *purposive sampling*. Informan penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa informan penelitian dapat membentangkan informasi data yang selengkap-lengkapnyanya dan relevan dengan tujuan penelitian.

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui sesuatu permasalahan tertentu yang dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya, baik berupaya perindustrian, pelayanan, keterangan atau dapat membantu dalam memenuhi persoalan informasi. Informan penelitian ada tiga macam, yaitu : Informan kunci (*key informan*), informan utama atau umum (*generar informan*) dan informan tambahan (*addtional informan*)

1. Informan kunci (*key informan*), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin Bapak Drs. Teddy Bachtari. yang menjalankan program Sembako dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KK) di Kabupaten Deli Serdang.
2. Informan utama atau umum (*general informasi*), yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Adapun Informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin Ibu Hj. Nani Aprinawati, SH yang menjalankan dan melihat langsung implementasi Program Sembako dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di masyarakat Kabupaten Deli Serdang.
3. Informan tambahan (*addtional informan*), yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi

sosial yang diteliti. Adapun Informan tambahan dalam penelitian ini adalah Ibu Asih Juniarti, Ibu Samini, Ibu Juliani, dan Ibu Suwarsih Masyarakat yang mendapatkan Bantuan Program Sembako dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera di Kabupaten Deli Serdang.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung terhadap obyek penelitian kemudian mencatat gejala – gejala yang ditemukan di lapangan untuk melengkapi data – data yang diperlukan sebagai acuan untuk yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses – proses pengamatan dan ingatan. Sutrisno H didalam buku Sugiyono (2013 : 166)

Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap suatu objek yang ada di lingkungan yang sedang berlangsung meliputi berbagai aktivitas perhatian terhadap kajian objek dengan menggunakan pengindraan. Suharsimi Arikunto (2012 :179)

3.4.2 Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang terjadi secara langsung antara dua orang atau lebih. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan orang yang diwawancarai disebut *interviewee*.

Menurut Setyadin (dalam Imam Gunawan, 2016 :160) wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dan peneliti melakukan wawancara mendalam, ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi. Untuk menghindari kehilangan informasi, maka peneliti meminta ijin kepada informan untuk menggunakan alat perekam. Dan sebelum dilangsungkan wawancara.

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun baik bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau akelogis.

Menurut Imam Gunawan (2016:175) mengemukakan bahwa sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Biasanya berbentuk surat – surat, catatan harian, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal – hal yang pernah terjadi di waktu silam.

Menurut Gottschalk (dalam buku imam gunawan, 2016:175) menyatakan bahwa dokumentasi dalam pengertiannya adalah setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.

Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto wawancara bersama Kelapa Bidang Pemberdayaan fakir miskin yaitu Bapak Drs. Teddy Bachtari , foto wawancara bersama Kepala Seksi Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin Ibu Hj. Nani Apronawati, SH, foto wawancara bersama penerima Program Sembako dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera yaitu Ibu Asih Juniarti dan Ibu Samini, serta data – data yang ada di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang yaitu Data Penerima Program Sembako dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Struktur Organisasi. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan semakin sah dan dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-foto.

3.4.4 Trianggulasi Data

Trianggulasi data adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dan sumber data yang telah ada/ trianggulasi data juga digunakan sebagai proses memantapkan derajat kepercayaan (keabsahan/validasi) dan konsistensi (reabilitas data, dan bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis di lapangan).

Menurut Sugiono (2014: 372) mengatakan bahwa trianggulasi data sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data atau sebagai pembandingan terhadap data itu sendiri.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Reduksi data

Menurut Sugiyono, (2018:247) Reduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting, mencari tema, polanya dan membuang yang tidak

perlu. Dengan demikian data yang sudah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

3.5.2 Penyajian Data

Penyajian data biasanya dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya, dan mencarinya bila perlu.

3.5.3 Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif (2007 :18) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti – bukti yang kuat mendukung pada tahap awal, didukung oleh bukti – bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibelitas. Miles and Huberman (2007 :18)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang peneliti sudah rangkum, dan data-data observasi wawancara yang dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Program Sembako dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Dilihat dari faktor komunikasi, faktor sumber, faktor disposisi, faktor struktur birokrasi dapat dikatakan belum berjalan efektif. Karena seperti masalah keterbatasan waktu pemberian sembako kepada Keluarga Penerima Manfaat. Kurang sigap dalam menanggapi masalah kurang tepat waktu pemberian sembako yang dikeluhkan KPM. Untuk mencapai keberhasilan Program Sembako dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), maka pendamping juga harus mengikuti pelatihan yang diberikan Kementerian Sosial, dan faktor yang menghambat Implementasi Program Sembako dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera di Kabupaten Deli Serdang.
2. Faktor yang menghambat implementasi Program Sembako dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) antara lain: keberadaan penerima Kartu Keluarga Sejahtera yang tidak jelas, dan tidak tepat sasaran bagi penerima bantuan. Keterbatasan waktu pemberian Sembako kepada Keluarga Penerima Manfaat yang biasanya diberikan sebulan sekali, tetapi dalam satu bulan Keluarga Penerima Manfaat belum mendapatkan Sembako.

5.2 Saran

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, adapun saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Pelaksana Program Kartu Keluarga Sejahtera di Kabupaten Deli Serdang harus melihat lebih teliti lagi masyarakat yang mendapatkan bantuan Program Kartu Keluarga Sejahtera ini agar tidak salah sasaran kepada yang tidak layak mendapatkan bantuan karena menimbulkan kecemburuan dan bisa memicu konflik diantara masyarakat.
2. Mensosialisasikan apa saja yang di perlukan untuk masyarakat yang menginginkan bantuan Kartu Keluarga Sejahtera ini, agar masyarakat dapat lebih mengetahui tentang bantuan Program Kartu Keluarga sejahtera. Dan sigap dalam menanggapi dan menangani masalah atau kesulitan yang dirasakan oleh Keluarga Penerima Manfaat.
3. TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) atau tim pendamping yang selalu melakukan memberikan pemahaman agar uang yang diterima dari Program Kartu Keluarga Sejahtera ini tidak disalah gunakan dan menanggapi keluhan-keluhan masyarakat dengan cekatan agar tidak ada masyarakat yang kebingungan.
4. Lebih tepat waktu dalam pemberian Sembako yang sudah ditetapkan di awal. Dan sigap dalam memberitahukan tentang keterlambatan atau masalah agar KPM juga tau dan memahami masalah yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

D, Nugroho, Riant. (2006) Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang. Jakarta: PT Gramedia.

Gunawan, I. (2016). Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Mulyadi, D. (2016). Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.

Muda, Indra. (2019). Transparansi Implementasi Kebijakan Publik. Medan: Media Persada.

Sugiono. (2014). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.

Syafri, Wirman. (2012) Studi Tentang Administrasi Publik. Jatinangor: Penerbit Erlangga

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. 2012. Jakarta : Bidang Sosial Republik Indonesia

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara nontunai.

Artikel Internet :

Pedoman umum program sembako

(<http://tnp2k.go.id/download/31991Pedoman%20Umum%20Program%20Sembako%202020.pdf>)

Skripsi Jurnal :

Zainuddin (2017) Analisis Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.

Karya Ilmiah :

Anggleni Andela (2018) Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang ISSN: 2654 – 3141

Rini Setyo, A (2016) Faktor – faktor kemiskinan di Indonesia. Jurnal Universitas Airlangga ISSN 2085-4617

Rosalina Ana, Hardjati Susi (2019) Efektifitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya

LAMPIRAN

Lampiran Wawancara

Pertanyaan untuk Informan Kunci

➤ Pertanyaan :

Struktur Birokrasi :

1. Bagaimana struktur Birokrasi di Dinas Sosial Kabupaten Deli serdang?
2. Bagaimana dengan pembagian dan tanggung jawab antar bagian?
3. SOP Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang dalam Implementasi Program Sembako?
4. Bagaimana hasil adanya Kartu Keluarga Sejahtera untuk masyarakat ?
5. Bagaimana cara pengambilan keputusan terkait program Program Sembako?

Komunikasi

1. Apakah pihak dinas sosial memberikan informasi kepada penerima Program Sembako? Siapa saja yang terlibat dalam proses sosialisasi?

2. Bagaimana prosedur pelaksanaan sosialisasi dari pihak dinas sosial kepada masyarakat?
3. Apakah pihak dinas sosial rutin memberikan informasi kepada penerima Program Sembako??
4. Adakah program / aplikasi untuk melihat informasi terkait BPNT di media massa / sosial?
5. Bagaimana komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait?
6. Apakah ada hambatan dalam proses sosialisasi?

Sumber Daya

1. Berapa jumlah pegawai Dinas sosial Kabupaten Deli Serdang, terkait dengan Implementasi Program Sembako?
2. Bagaimana kemampuan implementor/ pegawai dalam pelaksanaan kebijakan?
3. Apakah ada pelatihan-pelatihan peningkatan kualitas SDM?
4. Dari mana sumber anggaran Program Sembako?
5. Apakah anggaran tersebut sudah mencukupi kebutuhan dalam pelaksanaan kebijakan?
6. Seberapa besar anggaran dana yang dialokasikan untuk implementasi Program Sembako?

Disposisi

1. Bagaimana sikap pelaksana dalam pengimplementasian Program Sembako?

2. Apakah pemerintah daerah mendukung penuh dengan adanya Program Sembako?
3. Bagaimana komitmen pelaksan dalam pengimplementasian Program Sembako?
4. Bagaimana pengawasan dan pengendalian Program Sembako?
5. Apakah terdapat hambatan yang ditemukan dalam implementasi Program Sembako?

Pertanyaan untuk Informan Utama

➤ Pertanyaan :

Struktur Birokrasi :

6. Bagaimana struktur Birokrasi di Dinas Sosia Kabipaten Deli serdang?
7. Bagaimana dengan pembagian dan tanggung jawab antar bagian?
8. SOP Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang dalam Implementasi Program Sembako?
9. Bagaimana hasil adanya Kartu Keluarga Sejahtera untuk masyarakat ?
10. Bagaimana cara pengambilan keputusan terkait program Kartu Keluarga Sejahtera ?

Komunikasi

1. Apakah pihak dinas sosial memberikan informasi kepada penerima Program Sembako? Siapa saja yang terlibat dalam proses sosialisasi?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan sosialisasi dari pihak dinas sosial kepada masyarakat?
3. Apakah pihak dinas sosial rutin memberikan informasi kepada Program Sembako?
4. Adakah program / aplikasi untuk melihat informasi terkait BPNT di media massa / sosial?
5. Bagaimana komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait?
6. Apakah ada hambatan dalam proses sosialisasi?

Sumber Daya

7. Berapa jumlah pegawai Dinas sosial Kabupaten Deli Serdang, terkait dengan Implementasi Program Sembako?
8. Bagaimana kemampuan implementor/ pegawai dalam pelaksanaan kebijakan?
9. Apakah ada pelatihan-pelatihan peningkatan kualitas SDM?
10. Dari mana sumber anggaran Program Sembako?
11. Apakah anggaran tersebut sudah mencukupi kebutuhan dalam pelaksanaan kebijakan?
12. Seberapa besar anggaran dana yang dialokasikan untuk implementasi Program Sembako?

Disposisi

1. Bagaimana sikap pelaksana dalam pengimplementasian Program Sembako?
2. Apakah pemerintah daerah mendukung penuh dengan adanya Program Sembako?
3. Bagaimana komitmen pelaksan dalam pengimplementasian Program Sembako?
4. Bagaimana pengawasan dan pengendalian Program Sembako?
5. Apakah terdapat hambatan yang ditemukan dalam implementasi Program Sembako?

Pertanyaan untuk Informan Tambahan

Disposisi

1. Bagaimana respon bapak/ibu mengenai Program Sembako ini ?
2. Apakah bapak.ibu mengalami hambatan dalam proses pengurusan Program Sembako yang dikeluarkan pemerintah?
3. Apakah bapak/ibu mendukung adanya Program Sembako?
4. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap adanya Program Program Sembako ini?

Sumber daya

1. bagaimana kualitas sumber daya manusia dalam melayani proses pengambilan Program Sembako dapat melayani bapak/ibu dengan baik?
2. Apa ada biaya yang bapak/ibu keluarga dalam mengurus administrasi Program Sembako?
3. Bagaimana dengan sarana dan prasarana dalam proses pengurusan Program Sembako ini ?

Komunikasi :

1. Apakah ada sosialisasi dari Kantor Dinas Sosial dalam implementasi Program Sembako?
2. Bagaimana sosialisasi dilakukan, apakah sosialisasi tersebut dapat mudah di pahami dan di mengerti?
3. Bagaimana bapak/ibu mendapatkan Program Sembako tersebut?
4. Apakah dalam sosialisasi tersebut terdapat manfaat?
5. Apakah ada keluhan bapak/ibu dalam proses untuk mendapatkan Program Sembako?
6. Selama berjalannya Program Sembako ini, apakah tanggapan ibu mengenai Program Sembako?

Lampiran Dokumentasi Tempat Penelitian



Gambar 1. Kantor Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang



Gambar 2. Kantor Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Drs. Teddy Bachtaris sebagai Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin



Gambar 4. Wawancara dengan Ibu Hj. Nani Aprinawati, SH sebagai Kepala Seksi Bidang Penanganan Fakir Miskin



Gambar 5. Wawancara dengan penerima Program Sembako dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Ibu Asih Juniarti (37) di jalan sidumulyo gg.semangka, Batang kuis



Gambar 6. Wawancara dengan penerima Program Sembako dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Ibu Samini (48) di jalan Balai sesa, Tembung



Gamabar 7. Wawancara dengan penerima program Sembako dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). ibu Juliani (40) yang berada di Dusun V Kecamatan Baru.



Gambar 8. Wawancara dengan penerima program Sembako dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ibu Suwarsih (40) yang berada di Gang DPR dusun II kecamatan bakaran batu.



Gambar 7. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)

DATA INFORMAN

1. Informan Kunci

Nama : Drs. Teddy Bachtari

Usia : 56 tahun

Jabatan : Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin

Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara

2. Informan Utama

Nama : Hj. Nani Aprinawati, SH

Usia : 54 Tahun

Jabatan : Kepala Seksi Bidang Penanganan Fakir Miskin

Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara

3. Infoman Tambahan

Nama : Asih Juniarti

Usia : 37 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

4. Nama : Samini

Usia : 48 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

5. Nama : Juliani

Usia : 40 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

6. Nama : Suwarsih

Usia : 40 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus I : Jalan Kolem Nomor 1 Medan Estate/Jalan PBSI Nomor 1 ☎ (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax. (061) 7366998 Medan 20223
Kampus II : Jalan Seliabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A, ☎ (061) 8201994, Fax. (061) 8225331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 07/FIS.2/01.10/2021
Lamp :
Hal : Pengambilan Data/Riset
25 Januari 2021

Yth,
Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Deli Serdang
Jalan Karya Dharma Nomor 4 Lubuk Pakam

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Siti Ulfa Alfarishi
N P M : 178520017
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang, dengan judul Skripsi **"Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kabupaten Deli Serdang."**

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Heri Kusmanto, MA


**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Karya Dharma No. 2 Lubuk Pakam 20514 Kabupaten Deli Serdang
Telepon (061) – 7951422 Faks. (061) – 7951422
E-mail : bappedadeliserdangkab@gmail.com / Website: <https://bappedadeliserdangkab.go.id>

Lubuk Pakam, 26 Januari 2021

Nomor	: 070/ 251 /BPDS/2021	Kepada
Sifat	: Biasa	Yth. Kepala Dinas Sosial
Lampiran	: -	Kabupaten Deli Serdang
Perihal	: Rekomendasi/ Izin Melaksanakan Penelitian/Riset	di - Tempat

Sesuai dengan Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang Nomor : 070/100 tanggal 26 Januari 2021 dan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Nomor : 879/FIS.2/01.10/II/2021 tanggal 25 Januari 2021 perihal permohonan izin Rekomendasi Riset, yang akan dilaksanakan oleh :

a. Nama	: Siti Ulfa Alfarishi
b. Alamat	: Jl. Amaliun Gg. Abadi No. 36 C Medan
c. NIM/NIP/KTP	: 178520017
d. Pekerjaan	: Mahasiswa
e. Jurusan	: Administrasi Publik
f. Judul	: Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kabupaten Deli Serdang
g. Daerah / Lokasi	: Kantor Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang
h. Lama Penelitian	: 1 (satu) Bulan
i. Peserta	: Sendiri
j. Penanggung Jawab	: Dr. Heri Kusmanto. MA

Bersama ini disampaikan bahwa yang bersangkutan akan melakukan penelitian pada Perangkat Daerah yang Saudara Pimpin dengan kewajiban agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.


KEMUS L. G. H. HOLAN PARDEDE, M.Si
DEMIKIAN
NIP/ 19660506 199203 1 004

Pembusan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Deli Serdang di Lubuk Pakam sebagai laporan
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area (UMA)
4. Peringgal

 **PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**
DINAS SOSIAL
Jl. MAWAR NO. 18 LUBUK PAKAM
TELP. 061. 7956111 – 7956222
E-mail : dinsos@deliserdangkab.go.id
KODE POS : 20514

Nomor : 070/ 299 /2021
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Melaksanakan Riset

Lubuk Pakam, 01 April 2021
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Medan Area
di-
Tempat

Sehubungan dengan Surat dari Bappeda Kabupaten Deli Serdang Nomor : 070/251/BPDS/2021 tanggal 26 Januari 2021 perihal Rekomendasi/Izin Melaksanakan Penelitian / Riset yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : Siti Ulfa Alfarishi
2. Alamat : Jl. Amaliun Gg. Abadi No. 36 C Medan
3. NIM : 178520017
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Jurusan : Administrasi Publik
6. Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kabupaten Deli Serdang
7. Daerah/Lokasi : Kantor Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang
8. Lama Penelitian : 1 (satu) bulan
9. Peserta : Sendiri
10. Penanggung Jawab: Dr. Heri Kusmanto, MA

Benar telah diterima melaksanakan penelitian dan telah selesai melaksanakan penelitian / riset di Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


RUDI ALMAL TAMBUNAN, ST, MAB
NIP. 19790423 200903 1 003

Tembusan :
1. Kepala Bappeda Kab. Deli Serdang
2. Kepala Kesbangpol Kab. Deli Serdang